













- b) Drs. H. Sutrisno
  - c) H.M. Rofiq, S.Ag.
  - d) M. Hilmi Faqih, S.Ag.
  - e) Novi Rahardjo, S. STP., M.Si.
- 3) Pendayagunaan
- a) Hj. Shobiroh HS.
  - b) Zainuddin, S.Sos, M.M.
  - c) Muh. Nur, SH.
  - d) Saifullah Barnawi
  - e) Drs. M. Shoheh
- 4) Pengembangan
- a) Su'udiyah, S.H., MPD.
  - b) Drs. Abd. Wachid, MM.
  - c) H. Ruby Hartoyo, S.SOS, M.M.
  - d) Abd. Muiz, SIP
  - e) Ir. Mahmud tantowi, MM

Deskripsi Tugas dan Wewenang Pengurus serta Karyawan BAZNAS berdasarkan UU nomor 38 tahun 1999 yang selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri 581 tahun 2009 dan ketentuan tata kerja BAZNAS kabupaten/kota diatur pada pasal 11 yakni:

- a. Badan Pelaksana Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas:
  - 1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat

- 2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat
  - 3) Menyelenggarakan bimbingan di bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - 4) Menyelenggarakan tugas penelitian dan pengembangan, komunikasi, informasi, dan edukasi pengelolaan zakat
- b. Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi
- c. Komisi Pengawas Badan Amil Zakat daerah kabupaten/kota bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.

Tata kerja BAZNAS Kota Mojokerto juga telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 3 tahun 2010 pada Bab III bagian kedua pasal 6 hingga pasal 8, yakni sebagai berikut:

- a. Badan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan ketentuan agama dan tugas lain yang berkaitan dengan pengelolaan ZIS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pelaksana memperhatikan nasihat dan atau pertimbangan yang disampaikan oleh Dewan Penasihat.





Dewan Pembina	: 1. Drs. H. Mas'ud Yunus 2. Drs. Syamsuri Arif, M. Si 3. KH. Rofi'I Ismail 4. Ir. Mahmud Tontowi, MMT
Ketua	: Drs. H. M. Ma'shum Maulani, M. Pd. I
Wakil Ketua I	: Drs. H. Imam Sampurno
Wakil Ketua II	: H. Tatok Setyadi
Wakil Ketua III	: Hj. Su'udiyah, SH, M.Pd
Wakil Ketua IV	: Drs. H. Suratno
Koordinator Badan Pelaksana	: H. Wuliyono, S.E
Badan Pelaksana I	: Abdul Majid, S. Pd
Badan pelaksana II	: M. Fathur Rohman
Badan Pelaksana III	: Kusuma Dewi
Badan Pelaksana IV	: Nur Khanan, S. Pd. I

Deskripsi Tugas dan Wewenang Pengurus serta Karyawan BAZNAS berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011 yang selanjutnya diatur dalam Peraturan BAZNAS Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota pada Bab III Bagian Ketiga adalah sebagai berikut:

- a. Ketua mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugasn BAZNAS Kabupaten / Kota

- b. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS kabupaten/kota dalam perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, keuangan, administrasi perkantoran, sumber daya manusia, umum, pemberian rekomendasi, dan pelaporan. Bagian Keempat Bidang Pengumpulan
- c. Bidang Pengumpulan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua I. Bidang Pengumpulan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat, yang terdiri dari:
- 1) penyusunan strategi pengumpulan zakat
  - 2) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data muzaki
  - 3) pelaksanaan kampanye zakat
  - 4) pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan zakat
  - 5) pelaksanaan pelayanan muzaki
  - 6) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
  - 7) penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pengumpulan zakat
  - 8) pelaksanaan penerimaan dan tindak lanjut komplain atas layanan muzaki
  - 9) koordinasi pelaksanaan pengumpulan zakat tingkat kabupaten/kota.
- d. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua II. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas melaksanakan

pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, yakni sebagai berikut:

- 1) penyusunan strategi pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - 2) pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan data mustahik
  - 3) pelaksanaan dan pengendalian pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - 4) pelaksanaan evaluasi pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - 5) penyusunan pelaporan dan pertanggungjawaban pendistribusian dan pendayagunaan zakat
  - 6) koordinasi pelaksanaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat tingkat kabupaten/kota.
- e. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua III. Bagian Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan, dan pelaporan, diantaranya:
- 1) penyiapan penyusunan rencana strategis pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
  - 2) penyusunan rencana tahunan BAZNAS kabupaten/kota
  - 3) pelaksanaan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat kabupaten/kota
  - 4) pelaksanaan pengelolaan keuangan BAZNAS kabupaten/kota

- 5) pelaksanaan sistem akuntansi BAZNAS kabupaten/kota
  - 6) penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja BAZNAS kabupaten/kota
  - 7) penyiapan penyusunan laporan pengelolaan zakat tingkat kabupaten/kota
- f. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum dipimpin oleh satu orang wakil ketua dengan sebutan jabatan Wakil Ketua IV. Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia, dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota, administrasi perkantoran, komunikasi, umum, dan pemberian rekomendasi, diantaranya sebagai berikut:
- 1) penyusunan strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota
  - 2) pelaksanaan perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota
  - 3) pelaksanaan rekrutmen Amil BAZNAS Kabupaten/Kota
  - 4) pelaksanaan pengembangan Amil BAZNAS Kabupaten/Kota
  - 5) pelaksanaan administrasi perkantoran BAZNAS kabupaten/kota
  - 6) penyusunan rencana strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota
  - 7) pelaksanaan strategi komunikasi dan hubungan masyarakat BAZNAS kabupaten/kota
  - 8) pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, pengendalian, dan pelaporan aset BAZNAS kabupaten/kota



















pemberdayaan usaha produktif yang disebut dengan PUSYAR (Program Usaha Syaiah). Dalam proses pendistribusian dan pendayagunaan dimulai dari adanya pengajuan masyarakat atau *mustahiq* kepada pihak BAZNAS. Pengajuan diterima oleh staf bagian administrasi dan kearsipan untuk dilakukan dokumentasi, persiapan lembar disposisi, entri data ke komputer dan selanjutnya diserahkan kepada kepala kantor untuk seleksi pengajuan dan dikoordinasikan kepada pengurus dalam klasifikasi dan verifikasi pengajuan. Kemudian kepala kantor menugaskan staf bagian survey dan distribusi untuk melakukan survey kelayakan menjadi *mustahiq*. Setelah dilakukan survey data hasil survei lapangan didiskusikan bersama kepala kantor dan pengurus untuk memutuskan layak, tunda, segera atau tidak layak. Untuk berkas yang tidak layak selanjutnya diserahkan kepada bagian staf bagian administrasi dan kearsipan sedangkan untuk berkas yang layak diserahkan kepada staf bagian keuangan untuk selanjutnya disiapkan dana dan dokumentasi pencairan yang meliputi kwitansi dan lembar persetujuan pengeluaran ZIS. Terakhir, staf bagian survey dan distribusi bersama kepala kantor atau pengurus melaksanakan proses distribusi di lapangan.



### C. Penerapan Sistem Pengendalian Internal di BAZNAS Kota Mojokerto

Sistem pengendalian internal pada BAZNAS kota Mojokerto berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan zakat. Pengendalian pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah pada BAZNAS kota Mojokerto menjadi tugas dari Badan Pengawas. Berdasarkan Keputusan Menteri nomor 581 tahun 2009 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, segala kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah mulai dari perencanaan, pengumpulan, distribusi, dan pendayagunaan, seluruhnya harus diketahui oleh Badan Pengawas.

Dalam setiap proses pengelolaan zakat, infaq, shadaqah mulai dari pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan, peran dari Badan Pengawas sudah ada. Pada proses pengumpulan, berapa jumlah dana yang terkumpul, berapa muzakki, munfiq, mushaddiq yang ada di setiap UPZ, dan semuanya harus diketahui oleh badan pengawas. Begitu pula pada proses pendistribusian dan pendayagunaan, badan pengawas memantau apakah sudah tepat sasaran pendistribusian dan pendayagunaan kepada para *mustahiq* yang melakukan pengajuan kepada BAZNAS kota Mojokerto.

Sehingga bisa dikatakan pengendalian yang dilakukan di BAZNAS kota Mojokerto tidak hanya melihat laporan tertulis dari setiap bidang, tetapi juga dilakukan dalam setiap proses pengelolaan zakat.

Pengendalian dan pengawasan pada BAZNAS Mojokerto, tidak hanya dilakukan oleh Badan Pengawas, tetapi ada juga ada pengawasan dari luar,





